

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKARA PENGANIAYAAN HEWAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Hukum Pidana**

##### **1. Definisi dan Ruang Lingkup**

Tindak hukum pidana merujuk pada segala bentuk perilaku atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan pemberian sanksi pidana sebagai konsekuensinya. Konsep ini menjadi inti dari sistem hukum pidana di mana norma-norma yang telah ditetapkan oleh suatu negara dianggap sebagai landasan yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Tindakan pidana menandakan seriusnya pelanggaran tersebut terhadap norma-norma tersebut, yang umumnya terkait dengan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, tindakan pidana juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau nilai-nilai moral yang mendasari suatu masyarakat (Adji & Oemar, 1984)

Sebagai contoh, tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau penipuan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, mereka diatur oleh undang-undang pidana dan dapat dikenai sanksi berat, termasuk hukuman penjara atau denda yang signifikan. Sanksi pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan efek jera

kepada individu lain yang mungkin mempertimbangkan melakukan tindakan serupa.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perilaku yang melanggar hukum dianggap sebagai tindakan pidana. Beberapa pelanggaran diatur oleh hukum perdata atau hukum administrasi, yang mungkin melibatkan sanksi yang berbeda seperti pembayaran ganti rugi atau larangan melakukan aktivitas tertentu. Dalam konteks hukum pidana, sanksi lebih berat karena dianggap perlu untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari ancaman yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Dengan demikian, tindak hukum pidana mencerminkan kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Hukum pidana mengatur dan menetapkan norma-norma yang harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, serta memberikan kerangka kerja untuk menangani pelanggaran hukum dengan cara yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang tindak hukum pidana sangat penting dalam memahami bagaimana sistem hukum suatu negara berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu masyarakat (Lamintang, 2013).

Jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam lingkup hukum pidana sangat bervariasi dan mencakup berbagai aspek perilaku manusia. Pertama-tama, terdapat kejahatan terhadap kehidupan, yang meliputi tindakan seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, atau penganiayaan berat. Kejahatan ini mencerminkan serangan terhadap hak dasar seseorang untuk hidup, dan sering kali dihukum

dengan sanksi yang sangat berat karena dampaknya yang menghancurkan bagi korban dan keluarganya.

Selanjutnya, ada kejahatan terhadap kebebasan, yang mencakup tindakan seperti penculikan atau penahanan ilegal. Tindakan-tindakan semacam ini melanggar hak asasi manusia untuk kebebasan dan dapat memiliki konsekuensi yang traumatis bagi korban, serta menimbulkan kekhawatiran yang serius dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga kejahatan terhadap kehormatan, yang meliputi tindakan seperti pencemaran nama baik atau fitnah. Meskipun mungkin tidak secara fisik merugikan korban, tindakan-tindakan ini dapat menghancurkan reputasi seseorang dan berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Kemudian, terdapat kejahatan terhadap harta benda, yang mencakup tindakan seperti pencurian, perampokan, atau pemalsuan. Kejahatan ini merugikan korban secara finansial dan seringkali memiliki efek yang merusak pada rasa aman dan stabilitas dalam masyarakat. Selanjutnya, ada kejahatan terhadap keamanan publik, seperti terorisme atau perampokan bersenjata. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya menimbulkan ancaman langsung terhadap individu, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan keamanan negara secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis kejahatan lainnya, termasuk kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan, atau kejahatan *cyber*. Semua jenis tindak pidana ini memiliki dampak yang serius terhadap individu dan masyarakat, dan oleh karena itu diatur oleh hukum pidana untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang

mendalam tentang jenis-jenis tindak pidana ini sangat penting dalam menangani masalah kejahatan dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat.

## 2. Tujuan Tindak Hukum Pidana

Tujuan dari penerapan hukum pidana melibatkan serangkaian upaya untuk mencapai stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Pertama-tama, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dengan menetapkan norma-norma perilaku yang dilarang dan memberlakukan sanksi atas pelanggaran tersebut, hukum pidana berperan sebagai alat untuk mengurangi risiko terhadap individu dan komunitas.

Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan dengan memberikan efek jera yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan menetapkan hukuman yang tegas dan jelas bagi pelaku kejahatan, hukum pidana dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Tidak hanya itu, hukum pidana juga berupaya untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan tanggapan yang sesuai terhadap pelanggaran hukum. Ini mencakup aspek-aspek seperti memberikan kompensasi kepada korban, memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakannya, dan menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, hukum pidana juga berperan dalam memulihkan dan merehabilitasi pelaku kejahatan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di

masa depan. Ini melibatkan berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi yang bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku mereka, menyesuaikan diri kembali ke dalam masyarakat, dan menjadi anggota yang produktif dalam komunitas. Terakhir, penerapan hukum pidana juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban sosial dan keamanan negara. Dengan menindak tegas tindakan kriminal yang mengganggu stabilitas sosial atau mengancam keamanan negara, hukum pidana membantu menjaga stabilitas politik dan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, tujuan utama dari penerapan hukum pidana adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan stabil di mana individu dapat hidup dan berkembang tanpa takut menjadi korban kejahatan atau melanggar hukum. Ini merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang beradab dan beradil. Hukum pidana adalah instrumen yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta menegakkan keadilan di dalamnya. Pertama-tama, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menetapkan aturan dan norma-norma perilaku yang dilarang untuk mencegah tindakan kriminal yang dapat membahayakan individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup norma-norma yang melarang tindakan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau kejahatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan individu (Soesilo, 1995).

Selain itu, hukum pidana juga berperan dalam menegakkan keadilan dengan memberikan tanggapan yang sesuai terhadap pelanggaran hukum. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari memberikan kompensasi kepada korban hingga

memberlakukan sanksi yang sesuai kepada pelaku kejahatan. Dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi yang sesuai, hukum pidana membantu menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, hukum pidana juga memiliki peran yang signifikan dalam mencegah tindakan kriminal dengan memberikan efek jera yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan menetapkan hukuman yang tegas dan jelas bagi pelaku kejahatan, hukum pidana memberikan sinyal bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Hal ini dapat mengurangi motivasi individu untuk melakukan kejahatan, serta membantu membangun lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi semua anggota masyarakat.

Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dengan memberikan tanggapan yang tegas terhadap tindakan kriminal, serta memberlakukan aturan yang adil dan berlaku untuk semua, hukum pidana memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan beradab bagi semua warga masyarakat.

### 3. Prinsip Hukum Pidana

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dari hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan, keterbukaan, dan proporsionalitas dalam penerapan hukum. Salah satu prinsip utama adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang kecuali berdasarkan pada undang-undang yang ada. Hal ini

berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya telah diatur dan dijelaskan secara jelas sebagai pelanggaran hukum dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, prinsip asas kesalahan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika mereka secara sadar dan dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, unsur kesalahan atau kesengajaan sangat penting untuk diakui sebelum seseorang dihukum. Prinsip ini mencegah orang yang tidak bersalah dari penuntutan hukum yang tidak adil dan tidak proporsional (Hamzah, 2004).

Selain itu, prinsip asas proporsionalitas menggarisbawahi bahwa hukuman yang dikenakan haruslah sebanding dengan seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan haruslah seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan hukuman yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberian hukuman. Selain dari prinsip-prinsip tersebut, terdapat pula prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar dari hukum pidana, seperti prinsip non-retroaktif, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan prinsip keterbukaan. Prinsip non-retroaktif menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Sementara prinsip keterbukaan menuntut agar proses peradilan dilakukan secara

terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai keadilan sistem hukum.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, hukum pidana dapat menjalankan fungsinya dengan efektif untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana dilakukan dengan cara yang adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas, membentuk landasan yang kokoh bagi sistem hukum pidana. Pertama-tama, asas legalitas menegaskan bahwa kekuasaan hukum pidana hanya dapat diberlakukan jika didasarkan pada undang-undang yang ada. Hal ini memastikan bahwa semua tindakan pidana harus sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara jelas oleh undang-undang, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau penegak hukum (Utrecht, 1967).

Selanjutnya, asas kesalahan menetapkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika mereka secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hukuman hanya diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghindari penuntutan terhadap orang yang tidak memiliki kesalahan atau kesengajaan dalam melanggar hukum. Prinsip asas proporsionalitas menjamin bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan haruslah seimbang dengan seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Ini mencegah penggunaan hukuman yang berlebihan atau tidak

proporsional, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini juga membantu menjaga keadilan dalam sistem hukum pidana dengan menjamin bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Selain itu, prinsip-prinsip lain seperti prinsip non-retroaktif, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan prinsip keterbukaan, juga memiliki peran penting dalam membentuk landasan dari sistem hukum pidana. Prinsip non-retroaktif menegaskan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dengan memastikan bahwa hukum hanya berlaku ke depan, bukan berlaku surut. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Sementara prinsip keterbukaan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai keadilan sistem hukum.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana membentuk landasan yang kuat dan integral bagi sistem hukum pidana. Mereka memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana dilakukan dengan adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, sistem hukum pidana dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum**

### **1. Definisi dan Konsep Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum merujuk pada konsep dimana individu atau entitas dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku mereka yang melanggar hukum. Ini mencakup ide bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya dan harus menanggung konsekuensi dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini adalah salah satu pilar utama dari sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia dan merupakan landasan bagi keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban hukum berlaku untuk individu, badan hukum, atau organisasi yang dianggap memiliki kapasitas untuk bertindak dalam masyarakat. Ini berarti bahwa mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan secara individu atau melalui perwakilan mereka, serta atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan, agen, atau anggota mereka dalam ruang lingkup tanggung jawab mereka (Prodjodikoro, 2003).

Konsep pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam sistem hukum melalui serangkaian mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk menegakkan aturan dan norma hukum yang berlaku. Ini termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap individu atau entitas yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, pertanggungjawaban hukum juga dapat melibatkan pembayaran denda, hukuman penjara, rehabilitasi, atau kompensasi kepada korban sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Sistem hukum biasanya memiliki prinsip-prinsip dan prosedur yang jelas untuk menentukan

pertanggungjawaban hukum, yang sering kali didasarkan pada asas-asas seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Ini membantu memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum.

Secara keseluruhan, konsep pertanggungjawaban hukum adalah elemen kunci dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu dan entitas bertanggung jawab atas tindakan mereka, menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hukum. Dengan menerapkan konsep ini, sistem hukum dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dalam memelihara keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

## 2. Tujuan Pertanggungjawaban Hukum

Tujuan dari penerapan pertanggungjawaban hukum adalah untuk mencapai beberapa tujuan penting dalam sistem hukum dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan menetapkan aturan dan norma hukum yang jelas serta memberlakukan konsekuensi yang sesuai bagi pelanggar, sistem pertanggungjawaban hukum memberikan insentif bagi individu dan entitas untuk mematuhi hukum. Ketika individu menyadari bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik itu melalui sanksi pidana, sipil, atau administratif, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam perilaku mereka dan lebih cenderung untuk mematuhi hukum. (Prodjodikoro, 2003)

Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum. Dengan menegakkan aturan dan norma hukum serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, sistem pertanggungjawaban hukum menciptakan penghalang bagi individu atau entitas yang mungkin cenderung melanggar hukum. Ancaman konsekuensi yang serius atas pelanggaran hukum dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan kriminal atau melanggar aturan-aturan lainnya. Ini dapat membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya kekacauan serta konflik dalam masyarakat.

Selain itu, pertanggungjawaban hukum juga bertujuan untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum. Dengan memberikan tanggapan yang sesuai terhadap pelanggaran hukum, baik itu melalui hukuman, kompensasi kepada korban, atau tindakan korektif lainnya, sistem pertanggungjawaban hukum membantu memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum. Ini mencakup memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hukum, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban hukum berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang teratur, aman, dan adil. Dengan memberikan insentif bagi kepatuhan terhadap hukum, mencegah pelanggaran, dan memastikan keadilan dalam sistem hukum, pertanggungjawaban hukum membantu menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa nilai-nilai

keadilan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Ini adalah elemen krusial dalam menjaga kedamaian dan keadilan dalam suatu negara yang beradab.

### **C. Tinjauan Umum mengenai Sanksi Hukum Pidana dan Sistem Pembuktian**

#### **1. Jenis-Jenis Sanksi Hukum Pidana**

Berbagai jenis sanksi hukum pidana mencakup hukuman penjara, denda, hukuman mati, serta berbagai bentuk sanksi tambahan seperti hukuman kerja paksa, pengasingan, atau hukuman bersyarat. Masing-masing jenis sanksi ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya satu sama lain, dan biasanya diterapkan dalam situasi yang berbeda tergantung pada seriusnya pelanggaran hukum, pertimbangan keadilan, dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Hukuman penjara, misalnya, adalah sanksi hukum yang paling umum diterapkan di banyak negara di dunia. Hukuman ini melibatkan penahanan individu yang dinyatakan bersalah dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya diterapkan untuk kejahatan yang serius seperti pembunuhan, perampokan, atau narkoba. Karakteristik utama dari hukuman penjara adalah pembatasan kebebasan individu yang dinyatakan bersalah, dengan tujuan untuk mengisolasi mereka dari masyarakat dan memberikan efek jera (Moeljatno, 2002).

Denda, di sisi lain, adalah sanksi hukum yang melibatkan pembayaran sejumlah uang sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Denda diterapkan untuk berbagai pelanggaran, baik yang kecil maupun besar, tergantung pada seriusnya pelanggaran tersebut. Karakteristik utama dari denda adalah hukuman finansial yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan kepada negara atau korban

kejahatan. Tujuannya adalah untuk mengoreksi pelanggaran, memberikan restitusi kepada korban, serta memberikan efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Hukuman mati, yang dikenal juga sebagai hukuman gantung, adalah sanksi hukum yang paling ekstrim di mana eksekusi mati dilakukan oleh negara terhadap pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah. Hukuman ini biasanya diterapkan untuk kejahatan yang paling serius seperti pembunuhan yang terencana atau terorisme. Karakteristik utama dari hukuman mati adalah penerapan sanksi yang paling ekstrim, di mana nyawa seseorang diambil sebagai konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, menghukum pelaku kejahatan secara proporsional, serta memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku kejahatan lain. Setiap jenis sanksi hukum pidana memiliki implikasi yang kompleks dan kadang-kadang menjadi subjek perdebatan moral dan etika. Namun, mereka semua memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, memberikan keadilan, dan mencegah tindakan kriminal dalam masyarakat.

## 2. Tujuan Sanksi Hukum Pidana

Tujuan dari penerapan sanksi hukum pidana mencakup beberapa aspek penting dalam sistem hukum, seperti pemulihan, pencegahan, dan pembalasan. Penerapan sanksi hukum pidana bukan hanya tentang memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga tentang menciptakan efek jera, memulihkan kerugian yang timbul, serta memastikan bahwa keadilan dipenuhi dalam sistem peradilan. Salah satu tujuan utama dari penerapan sanksi hukum pidana adalah pemulihan. Sanksi hukum pidana bertujuan untuk memulihkan korban dan

masyarakat dari dampak negatif kejahatan yang dilakukan. Ini bisa berarti memberikan kompensasi kepada korban untuk merestorasi kerugian yang mereka alami secara finansial atau emosional. Selain itu, pemulihan juga dapat melibatkan program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab (Poernomo, 1994).

Selanjutnya, tujuan pencegahan juga menjadi fokus utama dalam penerapan sanksi hukum pidana. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan dengan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan potensial. Dengan memberikan sanksi yang sesuai dan proporsional, sistem hukum berharap untuk menanamkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kriminal, sehingga mengurangi insentif untuk melanggar hukum. Selain itu, ada juga aspek pembalasan yang terkait dengan penerapan sanksi hukum pidana. Pembalasan merupakan respons terhadap pelanggaran hukum yang bertujuan untuk menegakkan norma dan aturan hukum yang ada. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Pembalasan juga dapat memberikan kepuasan psikologis kepada korban dan masyarakat yang merasa bahwa keadilan telah dipenuhi.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi hukum pidana bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemulihan, pencegahan, dan pembalasan. Dengan memberikan sanksi yang sesuai dan bervariasi tergantung pada konteks kasus dan kebutuhan individual, sistem hukum berharap untuk mencapai tujuan-tujuan

tersebut dalam upaya untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan keadilan, serta mencegah dan mengurangi tindakan kriminal dalam masyarakat.

### 3. Proses Penentuan Sanksi Hukum Pidana

Proses penentuan sanksi hukum pidana melibatkan serangkaian tahapan yang terdiri dari penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tahapan-tahapan ini memastikan bahwa keputusan tentang sanksi hukum pidana yang akan diterapkan didasarkan pada fakta, bukti, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertama, proses dimulai dengan penyelidikan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian atau badan penegak hukum lainnya. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan apakah pelanggaran hukum telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Selama penyelidikan, bukti-bukti fisik, saksi, dan keterangan lainnya dikumpulkan dengan cermat untuk membangun kasus yang kuat (Lamintang, 2013).

Setelah penyelidikan selesai, kasus dapat diteruskan ke proses penuntutan. Di tahap ini, jaksa penuntut atau pihak berwenang yang berwenang mengajukan tuduhan resmi terhadap tersangka kepada pengadilan. Penuntutan ini didasarkan pada bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan dan bertujuan untuk membuktikan kesalahan pelaku kejahatan di hadapan pengadilan. Selanjutnya, proses dilanjutkan ke tahap pengadilan, di mana keputusan akhir tentang sanksi hukum pidana akan dibuat. Pengadilan akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut dan pengacara pembela, serta mempertimbangkan semua bukti yang diajukan. Pengadilan kemudian akan membuat keputusan tentang apakah tersangka bersalah atau tidak, dan jika bersalah, sanksi apa yang akan

diberikan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan sanksi hukum pidana mencakup seriusnya kejahatan, latar belakang pelaku, dan kepentingan korban. Seriusnya kejahatan akan mempengaruhi tingkat sanksi yang diberikan; semakin serius kejahatan, semakin berat sanksinya. Latar belakang pelaku juga dipertimbangkan, termasuk riwayat kriminal sebelumnya, keterlibatan dalam kegiatan rehabilitasi, serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan atau kesediaan pelaku untuk bertobat. Selain itu, kepentingan korban juga menjadi pertimbangan penting, dengan pemberian sanksi yang mungkin mencakup restitusi atau kompensasi kepada korban atas kerugian yang mereka alami.

Secara keseluruhan, proses penentuan sanksi hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat adil, berdasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, serta memperhitungkan berbagai faktor yang relevan. Dengan demikian, proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dan untuk mencapai tujuan-tujuan peradilan pidana yang berlaku.

#### **D. Tinjauan Umum Hewan dan Jenis Kejahatan terhadap Hewan**

##### **1. Pentingnya Perlindungan Hewan**

Perlindungan hewan memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan kehidupan di Bumi ini. Kesejahteraan hewan adalah komponen integral dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan hubungannya dengan kesejahteraan manusia dan lingkungan sangatlah erat. Pertama-tama, perlindungan hewan menjadi penting karena hewan-hewan adalah bagian dari

ekosistem yang rumit di mana kita hidup. Mereka memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan berbagai cara, seperti sebagai predator yang menjaga populasi spesies lain agar tidak meluas secara berlebihan, atau sebagai pemakan tumbuhan yang membantu menjaga pertumbuhan vegetasi dan siklus nutrisi. Gangguan terhadap populasi hewan atau bahkan kepunahan spesies dapat memiliki dampak yang luas terhadap ekosistem, termasuk menurunkan kualitas udara, air, dan tanah, serta mengganggu rantai makanan yang kompleks (Prodjodikoro, 2003).

Selain itu, kesejahteraan hewan juga memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan manusia. Dalam banyak kasus, penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan hewan berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, menjaga kesejahteraan hewan ternak dapat membantu mencegah penyebaran penyakit zoonosis, yang merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Dengan memastikan bahwa hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia dipelihara dan diobati dengan baik, risiko penularan penyakit dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, mengurangi tekanan terhadap populasi hewan liar dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan konflik antara manusia dan hewan.

Selain dampaknya pada manusia, kesejahteraan hewan juga memiliki dampak penting terhadap keseimbangan lingkungan. Kehadiran hewan dalam ekosistem memberikan layanan lingkungan yang tak ternilai, seperti menyebarkan benih tanaman, membantu dekomposisi materi organik, dan menjaga kesuburan tanah. Hilangnya spesies atau penurunan populasi hewan tertentu dapat mengganggu

proses-proses ini dan berdampak negatif pada ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, perlindungan habitat alami hewan juga penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan demikian, perlindungan hewan tidak hanya relevan bagi kesejahteraan hewan itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam bagi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Melindungi dan merawat hewan adalah tanggung jawab bersama kita sebagai bagian dari ekosistem yang saling terkait di planet ini. Dengan memprioritaskan kesejahteraan hewan, kita juga secara tidak langsung memperjuangkan kesejahteraan manusia dan lingkungan di mana kita semua hidup.

## 2. Definisi Hewan dalam Konteks Hukum

Dalam konteks hukum, definisi hewan sering kali bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukumnya dan kerangka regulasi yang berlaku. Salah satu definisi umum hewan dalam hukum adalah sebagai properti, yang berarti hewan dianggap sebagai aset atau benda milik individu atau entitas hukum yang memiliki kendali atas mereka. Definisi ini sering kali mencerminkan pandangan tradisional di mana hewan dianggap sebagai barang milik manusia dan dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dalam konteks ini, hewan sering kali diperlakukan sama seperti objek atau barang lainnya, dan hak-hak hukumnya dibatasi oleh status propertinya (Chomzah, 2003).

Namun, terdapat pula pandangan yang semakin berkembang di beberapa yurisdiksi hukum yang menganggap hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak. Definisi ini mengakui bahwa hewan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang independen dari manusia, dan oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk

diperlakukan secara etis dan memiliki perlindungan hukum terhadap perlakuan yang tidak pantas atau kejam. Konsep ini menekankan pentingnya pengakuan atas kesejahteraan hewan dan kebutuhan mereka untuk dihormati dalam sistem hukum. Di bawah pendekatan ini, hewan sering kali diberikan perlindungan tambahan dan hak-hak tertentu, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk perawatan yang layak, dan hak untuk kebebasan dari perlakuan yang merugikan.

Perbedaan definisi hewan dalam berbagai yurisdiksi hukum sering kali mencerminkan perbedaan budaya, nilai-nilai masyarakat, serta perkembangan dan kemajuan dalam pengetahuan tentang kesejahteraan hewan. Beberapa negara mungkin memiliki kerangka hukum yang lebih progresif dan memperlakukan hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak, sementara yang lain mungkin masih menganggap hewan sebagai properti. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara perlindungan hewan diatur, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan, perlindungan terhadap kejahatan terhadap hewan, dan hak-hak hukum yang diberikan kepada hewan. Dengan demikian, perbedaan definisi hewan dalam berbagai yurisdiksi hukum mencerminkan keragaman pandangan dan pendekatan terhadap perlindungan hewan di seluruh dunia. Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak hewan dalam beberapa yurisdiksi, masih ada tantangan dalam mencapai konsistensi dan perlindungan hewan yang efektif di tingkat global. Diperlukan upaya kolaboratif antar negara untuk memastikan perlindungan hewan yang memadai dan mengakui pentingnya kesejahteraan hewan dalam sistem hukum secara luas.

### 3. Jenis Kejahatan terhadap Hewan

Berbagai jenis kejahatan terhadap hewan, seperti kekejaman terhadap hewan, perdagangan hewan liar, perburuan ilegal, dan penelantaran hewan, tidak hanya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan hewan itu sendiri, tetapi juga memberikan implikasi yang serius secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pertama, kekejaman terhadap hewan mencakup tindakan seperti penyiksaan, penganiayaan, atau pengabaian yang menyebabkan penderitaan dan trauma pada hewan. Selain dari aspek moral dan etis, kekejaman terhadap hewan juga dapat memberikan dampak sosial negatif dengan menunjukkan ketidakpedulian dan kekerasan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia terhadap masyarakat dan lingkungannya (Maramis, 2013).

Kedua, perdagangan hewan liar atau satwa liar sering kali terlibat dalam perburuan dan perdagangan ilegal spesies yang dilindungi atau terancam punah. Implikasi ekonominya melibatkan dampak negatif pada ekosistem dan kerugian finansial bagi negara-negara yang bergantung pada pariwisata alam dan konservasi lingkungan. Selain itu, perdagangan hewan liar juga dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit zoonosis, yang berdampak pada kesehatan manusia dan ekonomi melalui biaya pengobatan dan upaya pencegahan.

Ketiga, perburuan ilegal menyebabkan penurunan drastis populasi hewan liar, mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Implikasi lingkungannya mencakup kerusakan habitat alami, perubahan iklim, dan gangguan terhadap rantai makanan dan ekosistem. Di samping itu, perburuan ilegal juga dapat menciptakan konflik antara manusia dan hewan liar, serta menimbulkan dampak

negatif pada komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka.

Keempat, penelantaran hewan, baik itu dalam bentuk kelaparan, dehidrasi, atau kurangnya perawatan medis, merupakan bentuk kejahatan yang merugikan kesejahteraan hewan secara langsung. Implikasi sosialnya termasuk menunjukkan kurangnya empati dan tanggung jawab individu terhadap makhluk hidup yang rentan, serta menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap individu yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Secara keseluruhan, berbagai jenis kejahatan terhadap hewan memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi kesejahteraan hewan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, ekonomi, dan lingkungan. Penting untuk mengenali implikasi dari tindakan-tindakan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menindak mereka secara efektif, baik melalui legislasi yang ketat, pendidikan publik, atau upaya konservasi dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat memastikan kesejahteraan hewan dan keseimbangan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan seluruh planet ini.

#### 4. Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Upaya perlindungan hewan yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan serta kebutuhan untuk melindungi mereka dari kejahatan dan penelantaran. Pemerintah sering menjadi penggerak utama dalam pembuatan undang-undang dan regulasi untuk melindungi hewan. Mereka mendirikan lembaga dan badan penegak

hukum khusus yang bertugas menegakkan undang-undang terkait kesejahteraan hewan dan melawan kejahatan terhadap hewan, seperti kepolisian hewan atau unit penegakan hukum lingkungan. Pemerintah juga bisa membuat kebijakan dan program-program untuk mendukung perlindungan hewan, seperti program konservasi habitat alami, pembatasan perdagangan hewan liar, dan pendidikan masyarakat tentang kesejahteraan hewan.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sering kali menjadi kekuatan penggerak di belakang perubahan hukum dan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hewan. Mereka dapat melakukan advokasi, kampanye sosial, dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu kesejahteraan hewan dan menekan pemerintah untuk bertindak. LSM juga dapat memberikan perlindungan langsung kepada hewan melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pemberian tempat tinggal bagi hewan yang terlantar atau disiksa. Selain itu, mereka sering bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menyediakan pelatihan dan bantuan dalam menangani kasus-kasus kejahatan terhadap hewan.

Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam perlindungan hewan. Individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadi mata dan telinga yang penting untuk mendeteksi dan melaporkan kejahatan terhadap hewan. Mereka juga bisa terlibat dalam upaya penyelamatan dan rehabilitasi hewan yang terlantar atau disiksa. Selain itu, masyarakat sipil bisa memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan perlindungan hewan dengan mendukung LSM, partisipasi dalam kampanye dan demonstrasi, serta menyuarakan dukungan mereka

kepada pemerintah untuk tindakan yang lebih tegas dalam melindungi hewan. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, menegakkan hukum terkait kejahatan terhadap hewan masih seringkali menghadapi tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi lembaga penegak hukum, kerumitan dalam menentukan dan membuktikan kasus-kasus kejahatan terhadap hewan, serta kurangnya kesadaran dan kesediaan untuk menindak oleh pihak berwenang. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, serta peningkatan sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan hewan. Dengan demikian, perlindungan hewan dapat menjadi lebih efektif dan menyeluru